

IMPLEMENTASI PROSEDUR ADMINISTRASI KONTRAK STANDAR (STUDI KASUS PADA PROYEK PRESISI 5 POLRI)

Edison Hatoguan Manurung¹, Kerlima Hutagaol², Dizzy Putrafakhmi³

^{1,2,3}Teknik Sipil Universitas Mpu Tantular

Email: edisonmanurung2010@yahoo.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :20-12-2025

Revised :02-01-2026

Accepted :08-01-2026

Keywords: contract administration, standard contracts, government construction projects, project control.

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

Contract administration is a crucial aspect of successful construction project implementation, particularly for government projects with high levels of complexity, accountability, and risk. This study aims to analyze the implementation of standard contract administration procedures in the Presisi 5 POLRI Project, identify its level of compliance with applicable regulations, and examine obstacles and improvement efforts. The research method used was a descriptive qualitative method with a case study approach. Data collection techniques included reviewing contract documents, field observations, and interviews with relevant parties. The results indicate that, in general, contract administration procedures have been implemented according to standards, but several obstacles remain in aspects such as documenting work changes, time management, and coordination between parties. This research is expected to provide practical contributions as evaluation material and recommendations for improving the quality of contract administration in government construction projects..

ABSTRAK

Administrasi kontrak merupakan salah satu aspek krusial dalam keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi, khususnya pada proyek-proyek pemerintah yang memiliki tingkat kompleksitas, akuntabilitas, dan risiko yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis implementasi prosedur administrasi kontrak standar pada Proyek Presisi 5 POLRI, mengidentifikasi tingkat kesesuaiannya terhadap regulasi yang berlaku, serta mengkaji kendala dan upaya perbaikannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen kontrak, observasi lapangan, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum prosedur administrasi kontrak telah diterapkan sesuai standar, namun masih terdapat beberapa kendala pada aspek dokumentasi perubahan pekerjaan, pengendalian waktu, dan koordinasi antar pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi dalam peningkatan kualitas administrasi kontrak pada proyek konstruksi pemerintah.

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu instrumen utama dalam mendukung peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks proyek konstruksi pemerintah, kontrak kerja konstruksi berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa. Oleh karena itu, administrasi kontrak memegang peranan penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan ketentuan kontraktual, spesifikasi teknis, anggaran, dan waktu yang telah disepakati.

Proyek Presisi 5 POLRI merupakan proyek pembangunan fasilitas strategis yang mendukung program transformasi POLRI berbasis Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). Skala proyek yang besar, keterlibatan banyak pihak, serta tuntutan akuntabilitas publik yang tinggi menjadikan penerapan prosedur administrasi kontrak standar sebagai kebutuhan mutlak. Namun, dalam praktiknya, masih sering dijumpai permasalahan administrasi kontrak seperti keterlambatan dokumentasi, ketidaksesuaian prosedur perubahan pekerjaan, dan lemahnya pengendalian klaim.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai implementasi prosedur administrasi kontrak standar pada Proyek Presisi 5 POLRI guna menilai tingkat kepatuhan terhadap regulasi serta mengidentifikasi peluang perbaikan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

1. Bagaimana implementasi prosedur administrasi kontrak standar pada Proyek Presisi 5 POLRI?
2. Sejauh mana kesesuaian pelaksanaan administrasi kontrak dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku?

3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan administrasi kontrak dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk:

- Menganalisis penerapan prosedur administrasi kontrak standar pada Proyek Presisi 5 POLRI.
- Mengidentifikasi tingkat kesesuaian administrasi kontrak terhadap peraturan dan dokumen kontrak.
- Memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas administrasi kontrak.

Manfaat Penulisan

Makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- Manfaat Teoretis: Menambah khazanah keilmuan di bidang manajemen konstruksi, khususnya terkait administrasi kontrak proyek pemerintah.
- Manfaat Praktis: Menjadi bahan evaluasi dan acuan bagi praktisi konstruksi dalam meningkatkan kualitas administrasi kontrak pada proyek sejenis.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi administrasi kontrak pada proyek yang diteliti.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian adalah Proyek Presisi 5 POLRI. Objek penelitian meliputi dokumen kontrak, prosedur administrasi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan kontrak.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Studi dokumen kontrak dan administrasi proyek
2. Observasi pelaksanaan administrasi kontrak di lapangan
3. Wawancara dengan pejabat pembuat komitmen, konsultan pengawas, dan penyedia jasa

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian digunakan sebagai alat bantu sistematis untuk mengumpulkan dan mengkaji data terkait implementasi administrasi kontrak. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Checklist Kepatuhan Administrasi Kontrak

Checklist ini disusun berdasarkan dokumen kontrak, regulasi pengadaan pemerintah, dan standar administrasi kontrak. Instrumen ini digunakan untuk menilai tingkat kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan yang

berlaku. Aspek yang dinilai meliputi administrasi dokumen kontrak, perubahan pekerjaan, pembayaran, pengendalian waktu, dan penyelesaian sengketa.

2. Panduan Wawancara Terstruktur

Panduan wawancara digunakan untuk memperoleh data kualitatif dari pihak-pihak terkait, seperti pejabat pembuat komitmen, konsultan pengawas, dan penyedia jasa. Pertanyaan difokuskan pada pemahaman prosedur administrasi kontrak, kendala pelaksanaan, serta upaya pengendalian dan perbaikan yang dilakukan selama proyek berlangsung.

3. Lembar Observasi Lapangan

Lembar observasi digunakan untuk mencatat secara langsung pelaksanaan administrasi kontrak di lapangan, khususnya terkait alur persetujuan dokumen, proses pelaporan kemajuan pekerjaan, serta mekanisme koordinasi antar pihak.

4. Matriks Kesesuaian Regulasi

Matriks ini digunakan untuk membandingkan ketentuan dalam dokumen kontrak dan regulasi yang berlaku dengan praktik administrasi kontrak di lapangan. Matriks kesesuaian berfungsi untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan serta potensi penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaan proyek.

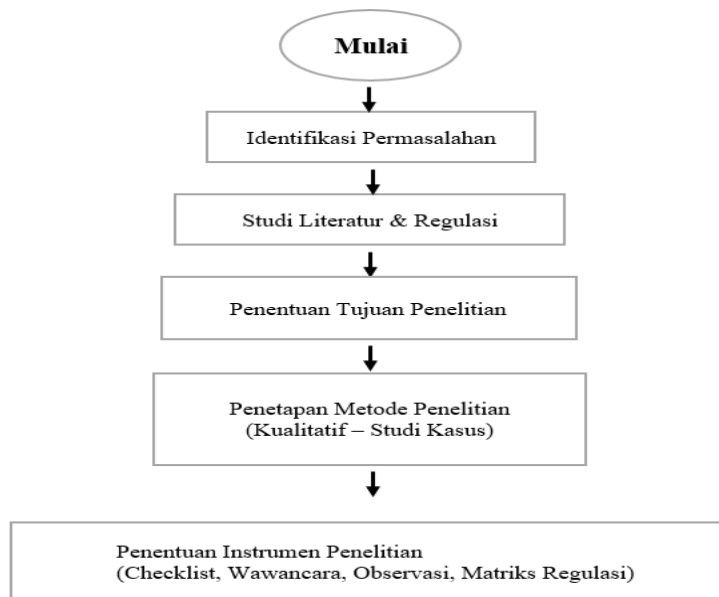
Teknik Analisis Data

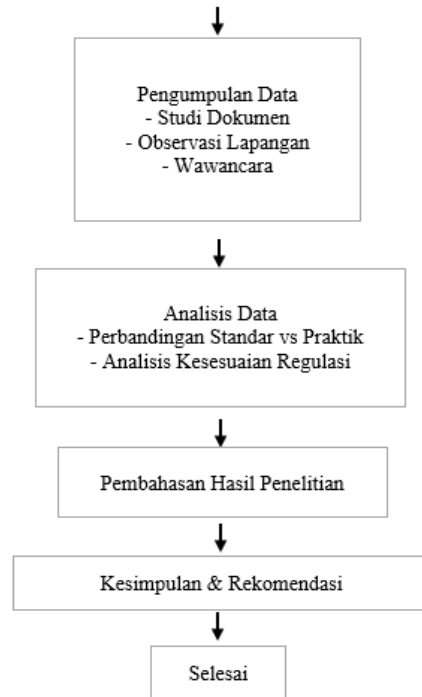
Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan praktik administrasi kontrak di lapangan terhadap prosedur standar dan regulasi yang berlaku.

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan praktik administrasi kontrak di lapangan terhadap prosedur standar dan regulasi yang berlaku.

Flowchart Alur Penelitian

Bagan alur pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:





HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Proyek Presisi 5 POLRI

Proyek Presisi 5 POLRI merupakan proyek pembangunan fasilitas penunjang operasional POLRI dengan nilai kontrak yang signifikan dan durasi pelaksanaan yang ketat. Proyek ini melibatkan pengguna jasa, penyedia jasa, konsultan pengawas, dan instansi pendukung lainnya.

Implementasi Prosedur Administrasi Kontrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar prosedur administrasi kontrak telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan regulasi, khususnya dalam hal administrasi pembayaran dan pelaporan kemajuan pekerjaan. Namun, pada aspek perubahan pekerjaan dan pengendalian waktu masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian.

Kendala dalam Pelaksanaan Administrasi Kontrak

Kendala utama yang diidentifikasi antara lain:
 Keterlambatan dokumentasi perubahan pekerjaan
 Kurangnya koordinasi antar pihak terkait
 Perbedaan interpretasi terhadap klausul kontrak tertentu

Upaya Perbaikan dan Evaluasi

Upaya perbaikan yang dilakukan meliputi peningkatan koordinasi melalui rapat rutin, penegasan prosedur perubahan pekerjaan, serta pemanfaatan sistem administrasi berbasis digital untuk meningkatkan akurasi dan ketertiban dokumen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi prosedur administrasi kontrak standar pada Proyek Presisi 5 POLRI secara umum telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis dan administratif yang perlu diperbaiki. Penerapan prosedur yang konsisten dan terdokumentasi terbukti berperan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan proyek.

SARAN

Peningkatan Disarankan agar pada proyek-proyek pemerintah selanjutnya dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang administrasi kontrak serta penerapan sistem manajemen kontrak berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. (2020). Dokumen Standar Pemilihan dan Kontrak Pekerjaan Konstruksi. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Ervianto, W. I. (2015). Manajemen Proyek Konstruksi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. New York: John Wiley & Sons.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.
- PMI. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Seventh Edition. Pennsylvania: Project Management Institute.
- Soeharto, I. (1999). Manajemen Proyek: Dari Konseptual sampai Operasional. Jakarta: Erlangga.
- Rahmawati, D. (2021). Analisis Penerapan Prosedur Administrasi Kontrak pada Proyek Konstruksi Pemerintah. Skripsi, Program Studi Teknik Sipil, Universitas MPU Tantular, Jakarta.
- Pratama, R. A. (2022). Implementasi Administrasi Kontrak Standar dalam Pengendalian Waktu dan Biaya Proyek Konstruksi. Skripsi, Program Studi Teknik Sipil, Universitas MPU Tantular, Jakarta.
- Dipohusodo, I. (2018). Manajemen Proyek dan Konstruksi. Jakarta: Kanisius.